



Bab 2

Isu-isu Besar Perekonomian Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



MDGs Menjadi Kerangka Pembangunan



MDGs (Millenium Development Goals) atau Tujuan Pembangunan Milenium, merupakan kerangka program dunia dalam mengentaskan kemiskinan. Targetnya pada tahun 2015 angka kemiskinan akan turun sebanyak 50 persen dari kondisi saat ini.

DELAPAN tujuan MDGs dengan 48 targetnya harus menjadi kerangka acuan bersama dalam melaksanakan pembangunan. Kerangka tersebut telah dikaji, dianalisa oleh berbagai ahli di belahan dunia dan telah disepakati oleh 189 negara. Tujuannya, program pemberantasan kemiskinan tidak bersifat parsial, tapi sudah terintegrasi ke dalam suatu kerangka acuan dan target yang diakui secara internasional.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

“Kita tidak melakukan program yang menurut kita bagus, tapi lepas dari kerangka acuan yang sudah diacu kebenarannya,” ungkap pengamat ekonomi dari Universitas Riau (Unri) Edyanus Herman Halim, SE MS kepada *Riau Pos* di kediamannya, pekan lalu.

Ada pun standar dalam kerangka pembangunan manusia tersebut yaitu konsep pemberantasan kemiskinan dan kebodohan, mewujudkan pendidikan dasar, menyetarakan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV, memerangi malaria dan penyakit menular lainnya, menjamin lingkungan hidup, dan mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Delapan kerangka acuan global itu menjadi acuan pembangunan manusia di dunia bersama 48 target yang ingin diwujudkan sampai 2015. Suatu lembaga dunia yang ditunjuk seperti UNDB (*United Nation Development Bank*), FAO (*Food Agriculture dan Organization*) yang akan melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap program MDGs.

Bila melihat kondisi di Riau, Edyanus menilai apabila pemberantasan kemiskinan dan kebodohan serta pembangunan sudah masuk dalam kerangka acuan MDGs itu, dengan sendirinya menjadi mudah mengukurnya, karena sudah pada basis standarisasi yang sama. Apalagi, program itu



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

sudah terkuantitatif dan semua sudah terukur. Misalnya, menyangkut kesehatan dan pendidikan sudah ada ukuran-ukuran standarnya. Sehingga, hasil ukuran-ukuran itu sudah sejauh mana pencapaiannya. Karena itu, memakai kerangka acuan yang sudah ditetapkan oleh PBB atau kerangka MDGs. Delapan tujuan ini nantinya diukur dulu beberapa capaian dari kondisi sekarang. Lalu diukur berapa setiap tahun secara gradual capaian-capaian itu.

Artinya, kita berharap masalah program mulai dari tahap perencanaan dan evaluasi dalam kerangka pemberantasan K2I dibingkai dalam suatu standarisasi yang sudah diakui secara internasional. Sehingga pencapaian dan kinerjanya akan semakin cepat, tegasnya.

Bahkan yang lebih penting lagi adalah sekarang bukan saatnya membicarakan soal masa lalu, tetapi ke depan berharap MDGs dijadikan kerangka acuan dan pedoman memberantas kemiskinan dan kebodohan maupun pembangunan infrastruktur. Apalagi MDGs sudah mendapat pengakuan internasional oleh PBB.

Sehingga nantinya jangan melihat orang Riau miskin, ketika kita menemukan satu orang Riau yang miskin. Tapi harus melihat dalam kerangka yang "global," ungkap Edyanus.

Sebagai pengukur dari hasil yang sudah dicapai



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

dapat melihat pada data Badan Pusat Statistik (BPS). Dari data-data di BPS itu, ada perbaikan dalam indeks pembangunan manusia, ada perbaikan dalam jumlah pendapatan, dan ada pengurangan dalam masyarakat miskin. Namun itu harus menjadi pemicu untuk membuat program-program yang lebih terstandar. Apalagi dengan program yang bersifat parsial, ada program yang tidak terlaksana dengan baik. Apabila itu dilaksanakan secara terstandar menurut standar internasional dan dilaksanakan dalam bingkai MDGs, program itu dapat mempercepat pencapaian dari tujuan MDGs itu sendiri.

Lebih jauh, Edyanus menerangkan, salah satu langkah kongkrit dalam mensosialisasikan MDGs di Riau. Edyanus mengatakan, dirinya dari pihak *Riau Innovative Development Action Group* 2015 (RINDANG 2015), merupakan *partner corporate social responsibility (CSR) Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP)*, mencoba menjembatani antara pemerintah dan pihak-pihak swasta dalam suatu simposium. Sehingga target dan kerangka MDGs itu bisa menjadi pedoman dan bingkai bagi pemerintah Riau dalam rangka memberantas kemiskinan dan kebodohan.

Memang sudah banyak dibuat oleh pemerintah Indonesia dan Riau khususnya. Tapi, kita ingin melihat program-program itu dalam suatu bingkai yang sudah terkait dalam kerangka MDGs,



sehingga secara internasional program yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah diakui oleh dunia internasional,” tegasnya lagi.

Edyanus juga mengungkapkan, untuk pencapaian delapan tujuan MDGs itu, peran utamanya adalah pemerintah. *Stakeholder* tidak hanya pemerintah. Oleh sebab itu, banyak perusahaan sekarang mendekati dengan konsep CSR. Setiap perusahaan, kalau dulu mengeluarkan dana *community development* (CD), sekarang lebih terbuka dengan berbisnis menggunakan pendekatan CSR, seperti yang dianjurkan para pakar *management strategic*. Semua ahli manajemen mewajibkan semua perusahaan berbisnis dengan melakukan pendekatan CSR.

“Kita ingin, CSR dari perusahaan dan program pembangunan pemerintah itu sejalan. Nah, itu yang perlu dijembatani dan semua *stakeholder* melakukan pengeroyokan terhadap seluruh target MDGs. Oleh sebab itu, kemaren diadakan simposium untuk menjembatani antara pemerintah, swasta masyarakat dan berbagai komponen di dalamnya secara bersama-sama melakukan pembangunan manusia sesuai kerangka MGDs,” ujar Edyanus.

Dalam kesempatan tersebut Edyanus juga memberikan catatan mengenai pelaksanaan MDGs di Provinsi Riau. Menurutnya, yang pertama adalah mengembalikan pelaksanaan pemberantasan ke-



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

miskin dan kebodohan itu atas basis kewilayahan dan masyarakat miskin sendiri. Bukan atas pemikiran dari pemerintah semata, yang seolah-olah menganggap dia paling benar, paling baik. Itu sangat tidak produktif dalam pemberdayaan masyarakat. Itu sebagai catatan pertama. *Kedua*, program kebun K2I dan sapi K2I perlu kita pertanyakan. Apakah program ini masih sesuai bagi memberdayakan masyarakat miskin dan bagi penanggulangan dan perbaikan mutu hidup masyarakat Riau.

Ketiga, yang penting dilakukan di Riau adalah melakukan redistribusi aset ekonomi. Tanpa ini, sulit bagi program-program ini untuk mencapai tujuan dan target dari MDGs tersebut. Konkretnya, apabila masyarakat hanya memiliki 1/4 lahan bagaimana mereka meningkatkan ekonominya. Sementara kaum elit di provinsi ini memiliki lahan yang sedemikian besar. Jadi kesempatan berusaha dan bekerja hanya dapat terbuka apabila kesempatan memperoleh aset ekonomi dilakukan secara adil.

Edyanus juga memaparkan sepintas lima misi MDGs di *Riau Pulp*. Dalam pelaksanaannya Edyanus juga bertindak sebagai personal konsultan implementasi program MDGs Riau Pulp. *Pertama*, mewujudkan sumber kehidupan yang kompetitif berkelanjutan bagi pemberdayaan masyarakat miskin. *Kedua*, mengelola sumber daya lokal secara optimal dan berkelanjutan untuk perbaikan



masyarakat miskin. *Ketiga*, menciptakan pola kehidupan kemasyarakatan yang harmonis dengan semangat kegotong-royongan. *Keempat*, mempercepat transfer ilmu dan teknologi untuk mendukung dinamika masyarakat miskin di Riau. *Kelima*, meningkatkan kualitas masyarakat miskin secara mandiri dan berkelanjutan.

Selain itu, menurut Edyanus, kerja sama dengan pihak media juga perlu dilakukan untuk sosialisasi ini. "Di Indonesia kawan-kawan jurnalis tidak bekerja sendiri-sendiri dalam kerangka ini. Kita ingin merancang suatu program yang lebih konkret dalam kerangka dalam pencapaian MDGs khususnya di bidang jurnalistik," aku Edyanus.

Karena suara, corong dan berbagai data, informasi sangat terkait dengan kepedulian kawan-kawan jurnalis dalam pencapaian MDGs ini. Jika perlu di Riau ini kita mengadakan konvensi secara nasional MDGs itu. *Riau Pos* melalui Rida K Liamsi sangat concern. Namun demikian kita semua harus mendorongnya. Bahkan sudah dibicarakan saat simposium tersebut untuk menggagas pertemuan para jurnalis.

Sehingga, lanjutnya, di setiap media nantinya ada rubrik yang setidaknya-tidaknya mensosialisasikan apa yang harus dikerjakan dalam kerangka MDGs, apa yang sudah diperoleh dari program-program pencapaian MDGs, dan apa sebaiknya yang dikerjakan. Peran pers dan jurnalis itu sangat besar dan sangat



diperlukan. Sehingga masyarakat cepat terentaskan
kemiskinan dan kebodohan.(ila)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Modal Dasar Pertumbuhan Ekonomi



PILPRES yang dilaksanakan secara demokratis yang membentuk pemerintahan legitimet, dipandang oleh pengamat ekonomi Universitas Riau, Drs Edyanus Herman Halim MM sebagai modal dasar pertumbuhan ekonomi bangsa. Diyakini, kondisi ekonomi mendatang akan semakin membaik, terutama dari sisi non-ekonomi, yaitu stabilitas politik dan keamanan yang sangat erat kaitannya dengan ekonomi makro.

“Ini modal dasar untuk ekonomi, begitu juga bagi Riau yang secara geografis terletak di pintu gerbang perekonomian dunia,” kata Pembantu Dekan III, Fakultas Ekonomi Unri, ini saat berbincang-bincang dengan *Riau Pos*, Kamis (22/9) di Kampus Gobah, Unri, Jalan Pattimura, Pekanbaru.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Bagaimana pandangannya terhadap hasil Pilpres ini, dikaitkan dengan ekonomi. Berikut penuturannya kepada wartawan *Riau Pos*, **Menrizal Nurdin**.

Banyak pihak menyatakan, berhasilnya Pilpres putaran kedua dianggap sebagai tonggak demokrasi di tanah air. Lain dari sisi ekonomi, apa kaitan konkrit dengan Pilpres ini?

Satu hal yang penting dicatat, bila Pilpres aman sampai pelantikan, dunia mencatat, Indonesia bisa melaksanakan demokrasi secara santun, jika dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Artinya, kalau demokratis dan aman, berimplikasi pada investasi. Kemenangan SBY, walau pun belum perhitungan final, menandakan SBY-JK, sangat diterima oleh rakyat. Buktinya bisa menang telak. Dengan demikian, pasar akan merespon positif, karena pasar menerima SBY. Lagi pula ini adalah yang pertama di Indonesia, sehingga legitimasi pemimpin ini sangat tinggi. Kondisi ini dapat memicu masuknya pebisnis-pebisnis atau investor menanamkan modal di Indonesia.

Bukankah selama kepemimpinan Megawati Soekarnoputri, ekonomi Indonesia sudah mulai membaik?

Ya, selama ini, basis ekonomi kita punya, nilai tukar, inflasi stabil, pertumbuhan baik, indikator makro ekonomi lain juga bagus. Hanya saja, semua masih digerakkan oleh faktor konsumsi. Basis



ekonomi kita selama ini masih dipengaruhi oleh faktor non-ekonomi, yaitu politik dan keamanan yang belum stabil. Begitu juga dari sisi pemerintahan, juga belum stabil. Dengan SBY terpilih dan tidak ada masalah sampai pelantikan, maka masyarakat internasional akan menganggap Indonesia sebagai lahan untuk investasi. Jika ini terus berlangsung baik, maka faktor non-ekonomi yang stabil itu akan mendorong bergeraknya perekonomian.

Apakah faktor kabinet nantinya akan mempengaruhi stabilnya faktor ekonomi dan non-ekonomi itu?

Ya, itu tentu. Jika SBY terjebak dalam bagi-bagi jabatan, ini tidak ada artinya sama sekali. Kalau berhasil menyusun kabinetnya secara profesional, Indonesia diibaratkan menjadi gadis cantik bagi internasional. Karena apa? Karena potensi pasar kita ada, SDA kita ada, tinggal mengembangkan infrastruktur untuk pengembangan investasi. Selanjutnya, bagaimana pemerintah menjaga stabilitas dalam artian positif, dan terus melaksanakan proses demokrasi yang baik.

Lalu apa makna yang Anda sebutkan itu bagi Riau?

Karena Riau menjadi gerbang ekonomi dunia, ini sangat besar artinya, dengan investor masuk, peluang itu bisa kita tangkap. Ini pun tergantung bagaimana kita meyakinkan investor, bahwa saat ini kita sedang berhadapan dengan sebuah peluang



untuk menggalakkan invesatasi, lapangan kerja, tumbuhnya ekonomi dan naiknya pendapatan masyarakat. Untuk program eksploitasi SDA, harus diarahkan berbasis pemberdayaan masyarakat. Bukan *kapital oriented*, tapi beorientasi pada pengembangan sumberdaya manusia. Jadi, harus ada perimbangan antara kepentingan investor dan pengembangan SDM kita.

Memang tidak salah kalau Riau harus memanfaatkan peluang-peluang yang dihasilkan dari Pilpres ini. Namun dalam pengembangannya, tetap diperlukan modal. Apakah salah, ketika Riau meminta DBH kepada presiden baru. Tanggapan Anda?

Saya pikir, modal dari DBH tidak satu-satunya. Menurut saya perjuangan itu sudah lama digaungkan. Dalam tiga tahun belakangan ini pun sudah dipenuhi oleh pusat, yang 15 persen itu. Tinggal yang kita bahas adalah cara meyakinkan pusat. Jika kita meyakinkan pusat dengan pola lama, yaitu mengatakan Riau banyak yang miskin, dan infrastruktur masih kurang, itu sudah tidak masanya lagi. Pusat juga sudah tahu kondisi itu. Tapi, apa yang dilakukan sekarang adalah membuat visibiliti kajian investasi untuk pengembangan wilayah ekonomi Riau. Itu ditawarkan dengan baik. Manajemen pemerintah kita harus mampu mengarahkan setiap elemen-elemen di Riau ini untuk mampu menawarkan sesuatu yang *pro-fitable*, demikian



juga dengan infrastruktur. Mari kita berikan argumen untuk proyek tertentu kepada pusat, misalnya apakah nanti akan dibiayai melalui DAU atau DAK. Seharusnya DAK, yang selama ini Riau tidak pernah mendapatkannya juga ikut diperjuangkan. Padahal dana ini bisa membangun infrastruktur, seperti Sumbang yang memperoleh DAK selama ini. Setahu saya, daerah yang dapat DAK itu Tanjung Pinang dan Kepri saja.

Lagi pula, sumber luar negeri bisa dimanfaatkan. Bagaimana pusat mengarahkan ke Riau. Jadi tidak hanya permukaan. Selama ini tidak secara mendalam. Apa potensi, bagaimana pola, cara dan berapa keuntungan yang bisa diraih investor. Sebab, mereka akan melihat dan mengukur. Itulah yang mereka inginkan sebenarnya.

Contoh di Pulau Rupat. Ada lahan sawit masyarakat yang selama ini, hasilnya mereka jual di Dumai. Karena jauh, maka harga jualnya rendah, tentu ini merugikan masyarakat. Salah satu langkahnya, pemerintah bisa menceritakan potensi ini kepada investor, untuk membangun pabrik kualitas ekspor di sana. Sebab, mereka kan tidak hanya menginginkan hanya mendengar bahwa Indonesia aman, sementara kebijakan ke arah itu tidak pernah dibuat.

Apakah Anda optimis kemenangan SBY ini akan membangkitkan ekonomi Indonesia, dan juga Riau?

Saya optimis, sistem pemerintah akan stabil. Hanya saja, setakat ini, SBY juga punya tantangan



besar. Yaitu, SBY memerlukan koalisi baru di parlemen, untuk memperkuat eksekutif, meyakinkan legislatif, karena di sana ada Partai Golkar dan PDIP yang bisa mendistorsi kebijakan, kalau tidak piawai melakukan lobi, maka ini akan berpengaruh. Tapi secara umum saya menilai, anggota dewan baru akan lebih rasional.

Dari sisi ekonomi, Riau tak mengenal krisis, bahkan pertumbuhan ekonomi Riau lebih tinggi dari nasional. Apakah ini bisa diartikan ekonomi Riau tidak dipengaruhi oleh Pilpres ini?

Terlalu ekstrim mengatakan demikian. Jelas, ada dampaknya. Cuma resonansinya tidak sebesar yang terjadi di Jakarta. Yang sangat berpengaruh itu adalah ekonomi berbasis perdagangan dan jasa. Sementara di Riau lebih banyak ekonomi berbasis pengelolaan sumber daya. Lagi pula, sedikitnya resonansi itu, juga terjadi karena Riau juga berada di lintas perdagangan dunia. Yang jelas Pilpres putaran kedua ini memberikan peluang untuk Riau lebih baik, asal otonomi daerah terus dijalankan pemerintah baru.

Walau bagaimanapun Pilpres ini bisa dijadikan momentum untuk Riau dalam meminta haknya untuk perbaikan ekonomi daerah ini juga. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan Riau ke pusat?

Riau harus menjelaskan peluang ekonomi daerah berbasis masyarakat secara detail. Saya



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

sangat puji apa yang dilakukan Gubri Rusli Zainal. Dia merancang infrastruktur multiyears untuk membuka isolasi daerah. Kita harus meyakinkan pemerintah pusat bahwa setelah minyak di Riau apa nanti diperoleh Riau, tapi kalau sudah ada semua, maka ketika minyak habis, Riau siap. Dan tidak sengsara.

Dari sisi perbankan, mungkin sejak reformasi, suku bunga bank sangat tinggi untuk kredit. Mungkin baru-baru ini saja agak turun. Tapi tampaknya kondisi ini juga dianggap berbahaya bagi ekonomi makro Indonesia. Ini kan berpengaruh pada ekonomi kelas menengah ke bawah. Bisa Anda jelaskan?

Suku bunga rendah, menurut Miranda Gultom, ekonomi sudah memanas, tingkat bunga relatif rendah, kayaknya penetapan, SBI naik mengakibatkan deposito dan kredit naik. Untuk pengembangan ekonomi masyarakat kelas menengah, harus ada spesial program. Menjadi tanggung jawab pemerintah sekarang untuk memikirkan itu. Ini untuk melakukan proteksi untuk usaha kecil.

Jika nantinya SBY-JK memang benar-benar memperhatikan Riau. Terutama dari sisi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Riau. Apa indikasi bahwa Riau itu mendapat perhatian dari SBY. Apakah dengan adanya seorang menteri dari Riau?



Goal menteri itu, dalam pandangan saya adalah politis sifatnya. Saya tidak melihat itu. Indikasinya, SBY-CK akan meletakkan Riau sebagai pintu gerbang perekonomian Sumatera. Karena secara geografis itu sudah jelas. Makanya pemerintah baru harus mempersiapkan SDM Riau sebagai gerbang ekonomi Indonesia di mata dunia. Kalau tidak itu juga akan berpengaruh bagi Indonesia secara keseluruhan.

Kalau tidak memperhatikan Riau, sama saja dia tidak memperhatikan nasib masa depan bangsa ini ke depan. Salah satu yang harus dibangun, misalnya memfokuskan pada pertumbuhan dan keamanan. Makanya, infrastruktur bagaimana gerbang Indonesia ini aman dan lebih sejahtera harus diciptakan dengan baik.***

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Kalangan Usaha Jangan Menangguk di Air Keruh



PEMERINTAH sudah memastikan akan kembali menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), terhitung awal Oktober mendatang. Namun, meski pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan pemberian kompensasi BBM untuk rakyat miskin, *toh* tetap saja memicu kontroversi. Reaksi penolakan muncul dari berbagai kalangan. Di pelbagai daerah, terjadi aksi demo memprotes kenaikan harga BBM tersebut.

Dalam pandangan pengamat ekonomi yang juga Dosen Fekon Universitas Riau, Edyanus Herman Halim SE, MS, pencabutan subsidi BBM terpaksa dilakukan pemerintah karena desakan kondisi perekonomian. Karena disubsidi, harga BBM memang jauh lebih murah dibanding luar negeri, tapi sangat membebani negara. Kondisi ini juga membuka



peluang terjadinya ekspor ilegal. Dan pada gilirannya memicu kemerosotan nilai rupiah terhadap dolar AS. “Subsidi BBM selama ini hanya dinikmati kalangan berada,” katanya. Justru itu, pengalihan subsidi berupa pemberian kompensasi BBM kepada rakyat miskin perlu dilakukan. Edyanus tak menampik kenaikan BBM berdampak pada kenaikan harga barang. “Yang penting, kalangan usaha jangan malah menanggung di air keruh,” ujarnya. Berikut petikan wawancara *Harjono* dari MENTARI dengan pria asal Teluk Kuantan yang juga menyandang gelar adat Datuak Bisai XII ini.

Bagaimana pandangan Anda soal kebijakan pemerintah yang kembali menaikkan harga BBM?

Dilihat dari permasalahan ekonomi Indonesia akhir-akhir ini, maka kenaikan harga BBM dalam negeri terpaksa dilakukan karena, pertama; Disparitas (perbedaan) harga BBM. Rendahnya harga di pasar dalam negeri dibanding luar negeri menimbulkan peluang bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan ekspor ilegal, seperti yang terungkap baru-baru ini. Subsidi BBM menyebabkan harga BBM dalam negeri lebih murah, sehingga berpeluang terjadinya penyelundupan yang mengakibatkan kelangkaan dalam negeri dan menimbulkan kerugian negara. Selama ini aparat negara tidak sanggup mencegah kejadian itu, bahkan yang lebih fatalnya, aparat malah ikut bermain.



Kemudian kedua, subsidi BBM yang mencapai Rp 128 trilyun sangat membebani negara. Padahal, subsidi itu lebih banyak dinikmati oleh kalangan berada, sehingga cenderung tidak adil. Karenanya pengalihan subsidi BBM kepada subsidi orang miskin memiliki dasar yang sangat kuat untuk dipertimbangkan. Hanya saja, ada dampak-dampak yang akan muncul akibat pengalihan subsidi itu. Pihak-pihak yang selama ini menerima subsidi sudah terbiasa menikmatinya dan para spekulan sangat diuntungkan dengan adanya disparitas harga, sehingga sudah barang tentu, mereka ingin mempertahankan keadaan tersebut. Ditambah lagi sistem kependudukan Indonesia yang sangat tidak baik, sehingga sulit untuk mengoptimalkan dan mengaktifkan proses pengalihan subsidi BBM kepada orang miskin. Akibatnya, tidak jarang subsidi tersebut salah sasaran, muncul kamufase, yang kaya menjadi orang miskin.

Sejauhmana pengaruhnya terhadap harga barang?

Harga barang-barang jelas akan mengalami peningkatan karena komponen biaya transportasi dan biaya produksi yang bersumber dari bahan bakar minyak juga akan akan meningkat. Tetapi bagi para pedagang atau industri tidak akan terlalu merugikan mereka. Soalnya, *spread* (harga jual beli) yang dinikmati selama ini cukup tinggi sehingga kenaikan produksi tidak begitu masalah. Bila nasionalisme



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

mereka (pedagang dan industriawan) tinggi, dihadapkan dengan persoalan bangsa yang, demikian kompleks, maka kenaikan harga-harga barang tersebut tidaklah terlalu tinggi dan melambung. Yang penting, kalangan usaha jangan malah menanggung di air keruh. Nah, di sinilah peran departemen dan dinas yang terkait, dimana harus mampu memantau kelancaran distribusi dan kenaikan harga yang tidak wajar. Aparat terkait harus mengantisipasi dengan cepat apabila terjadi penyimpangan yang dilakukan pedagang di lapangan.

Bagaimana kemungkinan rupiah akan kembali stabil?

Kebutuhan BBM dalam negeri jauh lebih besar daripada kemampuan produksi dan ekspor. Naiknya harga minyak internasional memaksa PT Pertamina membeli lebih banyak dolar di pasar valas (valuta asing). Setiap bulan bahkan mencapai US\$1,5 miliar. Hal tersebut merupakan pengaruh terhadap semakin murahnya rupiah. Dan rupiah menjadi tertekan.

Kondisi ini malah dimanfaatkan pula oleh spekulasi untuk mengambil keuntungan dari kemerosotan nilai rupiah tersebut dan selanjutnya diperparah pula oleh perusahaan-perusahaan yang melarikan dana keluar negeri. Jika harga BBM dinaikan sesuai dengan harga pasar, maka Pertamina tidak akan banyak membutuhkan dolar yang dapat memicu kenaikan dolar, sehingga rupiah bisa stabil.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Dalam persoalan BBM di Indonesia, permasalahan pemborosan juga penting diperhatikan. Berdasarkan hasil kajian Strategi Urban Road Infrastruktur (SURIF), jumlah lemborosan BBM akibat kemacetan lalu lintas telah mencapai Rp 10 trilyun pertahun. Saat ini, kemacetan lalu lintas telah menyebabkan 20% dari BBM digunakan kendaraan roda empat menjadi terbuang percuma atau mubazir. Padahal, setiap penghematan 10% BBM untuk premium akan dihemat sebanyak sebanyak 4.500 kilo liter perhari atau senilai US\$ 1,7 juta. Dan untuk solar sebanyak 7.000 kilo liter per hari atau senilai US\$ 2,8 juta. Angka tersebut di atas akan sama dengan produksi minyak mentah sebesar 90 ribu barel perhari. Jika dikaitkan dengan tingkat harga minyak mentah US\$ 50 per barel, maka nilainya mencapai \$4,5 juta.

Kesalahan dalam manajemen transportasi kita selama ini ternyata telah ikut pula berperan dalam memperparah keterjepitan kita dalam persoalan BBM. Oleh karena itu, sudah saatnya kini Indonesia, baik level pemerintah pusat maupun pada level pemerintah daerah, harus betul-betul memperhatikan manajemen pembangunan secara holistik (keseluruhan) dan berkesinambungan. Supaya kelak permasalahan sekarang ini tidak menjadi permasalahan anak cucu kita.

Bagaimana pandangan Anda tentang kebijakan pemerintah menyalurkan dana kompensasi



BBM sebanyak Rp 100 ribu per bulan untuk masyarakat berpenghasilan Rp 170 ribu perbulan?

Kompensasi BBM hanya merupakan istilah dialihkannya subsidi BBM kepada orang miskin, karena ada akibat-akibat (*cost*) yang akan timbul dari proses kenaikan itu terhadap masyarakat miskin. Kompensasi itu sudah merupakan ke-harusan.

Amun permasalahannya, selama ini Indonesia gagal membantu orang miskin karena ada beberapa faktor. *Pertama*, manajemen kependudukan di Indonesia tidak baik. Tidak jarang penduduk memiliki KTP ganda, dan bahkan pejabat pun disinyalir melakukan hal itu. Akibatnya, data tentang kependudukan tidak pernah akurat. Siapa yang miskin tidak jelas, bahkan dalam proses penentuan siapa sebenarnya yang miskin, tak jarang terjadi manipulasi hingga sasaran untuk mengentaskan kemiskinan menjadi rancu dan kinerja program tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua, mental aparat birokrasi tidak terdidik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga apapun program yang dilaksanakan untuk membantu orang miskin malah digunakan untuk memperkaya diri sendiri. Tidak jarang kita jumpai program dibuat pemerintah dengan “mengkambinghitamkan” kemiskinan. Dengan berdalihkan orang miskin, maka timbullah proyek, yang pada dasarnya jauh dari upaya pemberdayaan masyarakat miskin itu sendiri. Keadaan tersebut sangat ironis dan



menyakitkan masyarakat miskin. Mereka hanya menjadi jargon-jargon dalam pidato, tetapi mereka tetap saja sengsara menghadapi tekanan dan ketidakberpihakkan pemerintah kepada mereka.

Menurut Anda, apa langkah yang harus dilakukan pemerintah?

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk masa yang akan datang, *pertama*, mengelola manajemen kependudukan secara lebih baik, detail dan akurat sehingga tidak ada lagi kerancuan data tentang kependudukan, baik dalam aspek geografis maupun dalam aspek demografis (kesehatan, pendidikan, usia dan gender).

Kedua, membenahi tata ruang yang menjamin kesinambungan dan keseimbangan wilayah dengan mengarahkan pembangunan pada masyarakat pedesaan supaya tidak terjadi urbanisasi dan migrasi yang tidak efisien antarwilayah.

Ketiga, pengetatan program terhadap pola-pola dan implementasi penyaluran subsidi, seperti dengan memberikan sanksi yang tegas kepada pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan subsidi tersebut untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Yang jelas ke depan, alur birokrasi penyalurannya harus diperpendek sehingga sampai lebih cepat dan tepat. Pengawasan global juga mesti dilakukan secara berjenjang.

Apa harapan Anda untuk pemerintah dan masyarakat?



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pertama, pemerintah harus serius mengelola penyaluran kompensasi BBM ini dengan baik dan bertanggung jawab penuh sebagai pelayan masyarakat. Beban hidup masyarakat sudah sangat berat, jangan pancing masyarakat menjadi kalap dengan perbuatan-perbuatan yang bukan merupakan pelayanan terhadap masyarakat.

Kedua, hidupkan kembali lembaga swadaya masyarakat yang profesional dan peduli sebagai pengontrol dan bila perlu sebagai penyambung aspirasi rakyat. *Ketiga*, tindak tegas pejabat dan pengusaha yang mencoba memancing di air keruh. Hal tersebut harus dilakukan sebagai *shock therapy*, sehingga di masa yang akan datang orang takut berbuat untuk memanfaatkan situasi buruk untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Keempat, upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), baik tingkat nasional maupun daerah baik yang sendiri ataupun indikasi korupsi yang berjamaah harus dialihkan dananya untuk kepentingan masyarakat. Kalau ada yang tertangkap korupsi maka uangnya diberdayakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Dengan demikian, maka dukungan masyarakat terhadap pemerintah semakin kuat sehingga partisipasi masyarakat juga semakin membaik. ***



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Riau Bangkit dan Bank Riau di Dua Tititan



BANK Riau sebagai salah satu BUMD yang mempunyai *saving* terbesar, dianggap berpotensi diikuti dalam *holding company* PT Riau Bangkit. Namun ada yang menganggap kalau Bank Riau otonom saja.

TAK salah memang, kalau kini Bank Riau menjadi andalan dari Pemerintah Propinsi (Pemprop) Riau. Tak jua salah kalau kemudian Bank Riau sebagai BUMD yang dianggap paling sehat, kemudian menjadi ukuran terhadap perkembangan perputaran uang di Riau.

Barat kata, Bank Riau sebagai banknya orang Riau, menjadi maskot terhadap perkembangan perekonomian Riau. Sah-sah saja kalau kemudian



Bank Riau kemudian dilirik oleh Rusli Zainal sebagai kepala eksekutif dikembangkan di dalam sebuah *holding company*. Setidaknya itu yang diharapkan oleh Gubri demi menyehatkan BUMD lain yang dinilai sudah megap-megap.

Adapun HC yang akan dibentuk seperti yang sudah disosialisasikan akan dikemas dalam sebuah wadah perusahaan yang bernama PT Riau Bangkit. Menjadi atap bagi BUMD yang ada di Riau, termasuk Bank Riau salah satunya. Belakangan pun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) perusahaan ini pun sudah digulirkan dan dibicarakan di DPRD Riau. Namun jalannya tidak mulus, karena paripurna untuk pansus Riau Bangkit justru bermasalah.

Begitulah akhirnya kini masih tetap bermasalah. Karena ada pihak yang menyangsikan kemampuan HC, dan ada yang mendukung sepele. Menerima karena sudah wajar perusahaan daerah disatukan untuk lebih dikembangkan. Di sisi lain menolak karena perusahaan yang tergabung dalam HC tersebut lazimnya sejenis.

Sementara sekarang justru berbeda. Seperti yang diungkapkan Arsyadjuliandi Rahman, anggota dewan ini mendukung dibentuknya *holding company*, karena dianggap akan memperpendek birokrasi. Sementara Mukti Sanjaya anggota dewan dari PKS, justru menyangsikan masa depan HC tersebut.

Balung rintang itu semakin meruncing setelah kemudian direksi Bank Riau menolak untuk ikut



1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

bergabung dalam HC atas nama PT Riau Bangkit tersebut. Sikap tersebut semakin diperjelas ketika *hearing* direksi Bank Riau dengan pansus Riau Bangkit di DPRD Riau pekan lalu. Sikap menolak untuk bergabung dalam PT Riau Bangkit tersebut satu sikap dengan Riau Petroleum.

Khusus untuk Bank Riau alasan paling mendasar karena terikat dengan aturan perbankan. Namun, hingga kini pansus justru belum merasakan kalau direksi Bank Riau memberi alasan yang tepat. Karena merujuk ke daerah lain, justru bank daerah ikut masuk dalam HC.

"Kita sedang komunikasi dengan berbagai pihak. Formulasi apa yang tepat untuk memberikan penilaian terhadap Bank Riau ini. Apakah memperjuangkan masuk dalam HC atau tidak. Sementara Bank Indonesia kita akan tanyai tentang aturan terbaik untuk bank. Juga masukan dari daerah-daerah tentang HC," kata H Edis Basri, SH, Wakil Ketua Pansus Riau Bangkit pada AZAM di lantai II Hotel Aryaduta Jumat pekan lalu.

Lalu bagaimana sebenarnya pertimbangan dari sisi ekonomi perbankannya? Sikap apa yang harus diambil oleh Bank Riau? "Masuk tidaknya Bank Riau ke dalam HC PT. Riau Bangkit hal itu sangat ditentukan BI. Karena BI akan melihat, menguji, siapa-siapa yang berhak memiliki saham perbankan itu. Itu juga perlu lulus uji kelayakan dari BI. Begitu juga dengan perusahaan lain yang berada dalam satu



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

HC bersama Bank Riau nantinya (PER, PIR, SPR, RAL) tetap akan dilakukan uji kelayakan,” ulas Edyanus Herman Halim, kepada AZAM, Jumat pekan lalu di kediamannya di bilangan Lembah Sari Gobah.

Panggapan Edyanus memang HC Riau Bangkit didirikan untuk membuat sebuah perusahaan daerah yang memiliki asset besar. Sehingga, ketika kerjasama dengan perusahaan asing untuk sebuah institusi, perusahaan daerah di Riau tidak menjadi pelengkap atau penyerta saja.

Seperti membangun jalan tol, makanya perlu perusahaan dengan asset besar. Jadi, menurut Edyanus memang ada beberapa cara, bisa dengan mengembangkan sebuah perusahaan daerah menjadi anak-anak perusahaan PT Riau Bangkit tersebut. Sehingga 100 persen saham dari BUMD tersebut. Cara kedua betul-betul mendirikan perusahaan yang menyerap dana APBD. Atau yang ketiga dengan cara kombinasi, HC merupakan penggabungan antara kumpulan saham BUMD atau menyusu langsung ke APBD. Lalu, bagaimana nasib Bank Riau?

“Bank Riau sebaiknya tidak dilibatkan dalam HC. Justru Bank Riau sebaiknya diberi tugas untuk menjembatani UKM-UKM yang ada di Riau. Karena Bank Riau kan juga sudah buka cabang di kabupaten. Jadi, usul saya kalau Bank Riau lebih difokuskan pada *regional banking/local banking* saja. Dengan orientasi untuk perkembangan usaha masyarakat. Boleh menjadi bank devisa, tapi orientasinya adalah membangun



ekspor non migas dari masyarakat. Jadi, bagi saya sebaiknya ada dua "titian". Bank Riau fokus menggarap usaha tempatan, sementara HC mencari peluang kerjasama dengan *Multy National Corporate (MNC)*," kata Edyanus.

Memang seperti yang diinginkan oleh eksekutif, Bank Riau ikut tergabung dengan HC, terlebih lagi Bank Riau punya asset sebesar Rp 5 triliun. Edyanus memberi catatan agar jangan mencemari pikiran-pikiran terhadap HC Riau Bangkit dengan interest yang *non profesional bussines approach*. Jangan pula ditenggarai keinginan untuk membentuk HC Riau Bangkit dengan kecurigaan tak berdasar, sehingga bisa menyiasati agar Riau bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Sebaiknya fokuskan Riau Bangkit pada aspek visi dan sistem profesional saja. Termasuk kebutuhan sumber-sumber yang layak masuk Riau Bangkit. Ditambah dengan *good corporate governace*. Jadi, mengenai Bank Riau bukan persoalan yakin atau tidak yakin, tetap berdasar *fit and proper test*," papar Edyanus. *Rolling* masukan dan usul memang akan mempengaruhi masuk tidaknya Bank Riau ke dalam HC Riau Bangkit. Aturan perbankan BI pun tidak bisa dinafikan. Ibarat dua titian, Bank Riau memang harus bersikap. (ong)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Filosofi PEK Mulai Melenceng

PELAKSANAAN program ekonomi kerakyatan (PEK) pada tahun 2003, yang dikelola oleh PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PT PER), dimana dalam penyaluran dana pinjaman akan menggunakan lembaga keuangan mikro pada masyarakat, serta dengan tingkat suku bunga yang bukan lagi sebesar tiga persen, dianggap oleh ekonom Riau, Edyanus Herman Halim, SE MS, telah menyimpang, dan keluar dari filosofi awal ekonomi kerakyatan.

Pelaksanaan ekonomi kerakyatan yang dilakukan Pemprov Riau pada tahun 2003 telah melenceng dari filosofi awal. Dimana filosofi awal ekonomi kerakyatan, adalah memberikan dana murah pada masyarakat untuk mengembangkan



produktifitas masyarakat ekonomi kecil,” ungkap Edyanus pada *Riau Pos*.

Sosok yang sudah terlibat sejak awal dalam program ekonomi kerakyatan ini mengungkapkan, bahwa dana ekonomi kerakyatan tidak boleh bersaing dengan dana-dana pinjaman yang ada pada perbankan umum, serta mengingatkan, bahwa bunga dana ekonomi kerakyatan tidak boleh disamakan dengan bunga dari dana-dana perbankan.

“Yang menjadi sasaran dana ekonomi kerakyatan adalah masyarakat-masyarakat kecil, untuk mendapatkan pinjaman dengan bunga rendah guna meningkatkan pendapatan mereka, dan bukan pendapatan dari lembaga keuangan mikro. Karena dana PEK untuk masyarakat miskin, maka bunga pinjaman yang diberlakukan tidak boleh besar, serta dengan prosedur yang sederhana dalam mendapatkannya,” ucapnya.

Dijelaskannya, dengan adanya penyaluran dana pinjaman modal pada masyarakat, maka akan terjadi peningkatan pendapatan masyarakat, yang mengakibatkan peningkatan konsumsi, sehingga dapat menumbuhkan kreatifitas masyarakat. “Disamping terjadinya pendapatan masyarakat, maka kreatifitas masyarakat akan meningkat yang selanjutnya akan terjadi peningkatan konsumsi. Dengan semakin meningkatnya konsumsi masyarakat, maka juga akan terjadi peningkatan ekspansi pasar baru bagi produsen,” ucap Edyanus.



Dalam pemikiran Edyanus, saat ini PT PER terlihat melemparkan dana pinjaman pada masyarakat melalui keuangan mikro, yang selanjutnya lembaga keuangan mikro meminjamkan dana PEK pada masyarakat dengan tingkat suku bunga yang bervariasi. Dengan digulirkannya dana murah pada masyarakat, dan dengan tetap dalam bentuk pinjaman, adalah merupakan proses pendidikan. Sedangkan sifat bantuan yang ada pada dana PEK, adalah dengan menerapkan dana murah.

Jadi sekarang proses pendidikannya nampaknya tetap ada, karena masih dalam bentuk pinjaman dan bukan hibah, namun sifat bantuannya sudah berkurang. Keberpihakannya pada masyarakat nampaknya sudah berkurang,” tegasnya.

Sedangkan besarnya jumlah dana untuk membantu ekonomi masyarakat kecil, menurut Edyanus, saat ini jumlah dana yang tersedia belum mampu mencukupi untuk melayani masyarakat banyak, sehingga hal inilah yang semestinya mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah dalam mencari jalan keluarnya.

Perlu koordinasi dengan kabupaten/kota dan provinsi untuk mengumpulkan dana secara bersama-sama ke dalam suatu wadah tertentu, dan selanjutnya bagaimana memikirkan penggunaan dana tadi sesuai dengan kontribusi masing-masing. Bila perlu kita undang tenaga ahli yang berpengalaman dalam melakukan pemberdayaan masyarakat untuk mengelola



dana sebesar itu,” ucapnya.

Adanya inkonsistensi dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi rakyat oleh Pemprov Riau, menurut pandangan Edyanus adanya kesan program yang dilaksanankan terkesan tambal sulam.

“Model yang digunakan selalu berubah setiap tahun akibat adanya protes. Memang boleh berubah, namun tidak boleh merubah filosofi dasar. Yang harus diubah adalah proses implementasinya, sekarang justru filosofinya yang sudah keluar. Dan dana PEK sekarang ini sudah mahal bagi rakyat, seharusnya dana ini merupakan dana murah bagi rakyat,” tegasnya.

Dijelaskannya, bahwa dengan bunga pinjaman PEK yang mencapai 6 persen yang dihitung secara *flat*, maka sebenarnya bunga pinjaman yang dibebankan pada masyarakat penerima bisa mencapai 9 persen hingga 12 persen.

“Bunga pinjaman PEK sebelumnya hanya 3 persen *flat* yang berarti bisa mencapai 6 persen, namun jika sekarang 6 persen, maka sebenarnya bunga pinjaman itu telah mencapai 9-12 persen. Model PEK sekarang menjadi kerisauan bagi saya, namun karena ini kebijakan pemerintah, ya silahkan saja. Dan mari kita lihat apakah dapat berhasil. Dan yang terpenting masyarakat dapat mendapatkan dana pinjaman dan alokasi dana ditambah,” ucap Edyanus bertanya.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber;
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
 2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Soa Pembangunan Pasar Modern Bangkinang

Pilih Investor atau Dana APBD



PEDAGANG Pasar Inpres Bangkinang menolak kehadiran investor untuk membangun pasar modern. Jika tetap dibangun, investor tidak dibenarkan ikut berbisnis nantinya.

SETELAH berkali-kali melakukan aksi demonstrasi menolak kehadiran investor untuk membangun pasar modern di Bangkinang, akhirnya para pedagang dan mahasiswa diundang untuk berdialog dengan Bupati dan investor di Bangkinang Jumat pekan silam. Pada kesempatan itu, bupati tetap pada pendirian semula bahwa pasar modern tersebut akan dibangun oleh investor mengingat dana APBD Kampar tidak memadai untuk membangun pasar modern. Bupati Kampar memberikan pemahaman



untung ruginya pemabangunan pasar modern tersebut jika dibangun melalui dana APBD dan melalui dana investor.

Meski tetap keberatan dengan rencana tersebut, para pedagang yang telah membentuk Forum Komunikasi Pedagang Pasar Inpres Bangkinang memberikan persyaratan, senadainya pembangunan tersebut tetap dibangun oleh investor mereka menuntut agar investor tidak dibenarkan untuk melakukan aktivitas bisnis di pasar yang dibangun tersebut. Investor cukup membangun bangunan fisik semata sementara pelaku bisnisnya adalah pedagang yang telah lebih dulu menempati Pasar Inpres yang lama.

Persyaratan ini diutarakan pedagang, karena informasi yang mereka terima rencana pembangunan pasar modern tiga lantai ini akan merugikan pedagang lokal. Sebab lokasi-lokasi strategis akan dihuni oleh pelaku bisnis dari luar. Pedagang juga menyebutkan lokasi-lakasi strategis itu dimanfaatkan investor untuk berbisnis nantinya. Sementara mereka hanya menempati lokasi yang tidak representatif sehingga akan kalah bersaing dengan pemilik modal besar itu.

Lagi pula mereka menyebutkan selain menghuni lokasi strategis, investor juga memproduksi berbagai jenis keperluan masyarakat dan akan dijual di lokasi strategis di pasar modern yang mereka bangun itu.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Kontroversi pembangunan pasar modern ini makin menarik disimak lantaran ini terjadi di saat pemerintah sedang giat-giat mendatangkan investor. Sayangnya, setelah investor bersedia menanamkan modalnya, penolakan pun terjadi. Lalu perbedaan pembangunan memakai investor atau dana pemerintah? Menurut pengamat ekonomi Edyanus Herman Halim, ada dua jenis investasi. Pertama investasi swasta (*private investor*) dan investasi pemerintah (*government investor*).

Investasi pemerintah timbul karena investasi swasta tidak tertarik di sektor tersebut, seperti jalan, jembatan yang orientasi provitnya (keuntungan) rendah. Oleh sebab itu, pemerintah berinvestasi di sektor yang tidak berorientasi provitnya tinggi tetapi benefit (manfaat).

Sebaliknya, jika swasta yang berinvestasi orientasinya adalah benefit atau keuntungan. Yang akan dipikirkan oleh investor adalah berapa tingkat pengembalian modal dan kapan uang yang ditanamkan itu bisa kembali. Maka jangan berharap jika pemerintah menawarkan investasi kepada swasta bila dua hal tersebut tidak terpenuhi, maka swasta tak akan melirik apa yang ditawarkan pemerintah tersebut.

Inilah yang terjadi dalam kasus rencana pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai. Meski telah ditawarkan kepada investor, hingga saat ini belum juga ada investor yang berminat. Ini terjadi lantaran



investor memikirkan dua hal tadi, kapan uang kembali dan seberapa besar pengembaliannya.

Tidak seperti rencana pembangunan pasar modern di Bangkinang. Ketika hal itu ditawarkan ke investor oleh bupati, maka PT Papan Makmur Permana langsung menyanggupinya. Mengapa investor berminat, karena pembangunan pasar dianggap bisa memenuhi dua hal yang dibutuhkannya.

Namun sayangnya, karena rencana pembangunan tersebut belum tersosialisasi dengan matang, para pedagang dan mahasiswa di daerah itu menolak pembangunan pasar modern tersebut oleh investor. Mahasiswa dan pedagang menginginkan pasar tersebut dibangun oleh dana APBD.

Para pedagang yang didukung mahasiswa menilai pembangunan pasar modern melalui investor hanya akan memperburuk nasib mereka. Mereka akan tersingkir lantaran investor hanya mengejar keuntungan dari pembangunan pasar tersebut. Lagi pula investor yang akan membangun pasar di situ kabarnya juga melakukan berbagai jenis bisnis di pasar yang telah dibangun itu nantinya.

Aksi turun ke jalan pun dilakukan guna mengambil simpati berbagai elemen masyarakat agar pembangunan pasar tersebut tidak dibangun oleh investor. Setelah ditelusuri, ternyata rencana pembangunan tersebut ternyata belum tersosialisasi dengan baik sehingga aksi-aksi tersebut meluas.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Di mata pengamat ekonomi Riau, Edyanus Herman Halim, pembangunan pasar oleh investor sudah tepat dilakukan. Mengingat dana APBD sebuah daerah cukup terbatas yang hanya mampu membiayai investasi yang sifatnya memberikan manfaat kepada masyarakat dan tidak mengejar keuntungan.

Sungguh tidak tepat jika ada penolakan terhadap investor. Sebab dana daerah yang sedianya untuk pembangunan pasar tersebut bisa digunakan untuk membangun gedung sekolah, jalan, jembatan atau hal-hal yang bermanfaat lainnya yang tidak diminati oleh investor.

Namun Edyanus memahami apa yang terjadi dalam kasus penolakan investor di Bangkinang, itu. Sebab selama ini masyarakat ada yang trauma dengan perilaku investor yang hanya memikirkan keuntungan semata. Padahal dalam prinsip kapitalis modern harus memiliki sifat memakmurkan semua orang yang terlibat dalam proses investasi tersebut. Bukan hanya memberikan kesejahteraan bagi pemilik modal semata.

"Pengalaman buruk selama ini karena para pengusaha hanya sekedar mengejar rente atau keuntungan, tidak memperhatikan masyarakat sekitar," ujar tenaga pengajar Universitas Riau ini.

Edyanus juga menyebutkan pengalaman buruk ini terjadi lantaran selama ini pengusaha dilindungi



oleh penguasa untuk mencekik masyarakat. Sering terjadi masyarakat digusur padahal telah menyerahkan harta benda miliknya. Hal inilah yang perlu dihilangkan. Sehingga terjadi negosiasi, yang bisa memberikan keuntungan kepada ketiga belah pihak. Pemerintah mendapatkan pajak, pengusaha mendapat keuntungan dan masyarakat mendapatkan kesejahteraan dan peluang usaha.

Edyanus menyebutkan, pasar modern dan tradisional hanya untuk sebutan semata. Yang paling penting adalah tempat berusaha pedagang tersebut bisa bersih dan representatif. Agar bisa bersih, rapi dan representatif konsekwensinya adalah pembiayaan pembangunan. Karena selalu ingin berubah ke arah yang lebih baik. Untuk itu memang perlu adanya pengorbanan. "Namun jangan sampai mengorbankan dan mensia-siakan masyarakat. Di sinilah letak peran pemerintah," ujar Edyanus.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Pembangunan Riau Salah Kaprah



DALAM pandangan pakar ekonomi dari Unri, Edyatus Herman Halim, masalah kemiskinan dan gizi buruk di Riau harus jadi perhatian serius. Terjadinya gizi buruk diakibatkan kurangnya kepedulian pemerintah Provinsi Riau dan kabupaten/kota dalam menangani kasus tersebut, khususnya dalam mengantisipasi pemenuhan hak-hak rakyat di bidang pangan dan kesehatan.

Padahal, kata dia, kedua hak dasar masyarakat tersebut dilindungi oleh undang-undang. Artinya, kewajiban negara untuk menjaga terpenuhinya kebutuhan pangan dan kesehatan masyarakat. Sedangkan kebutuhan masyarakat lainnya yang dijamin undang-undang adalah pendidikan dan perumahan yang layak. "Apabila tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut maka berarti pemerintah lalai terhadap masyarakatnya," tukas



Edyanus kepada MENTARI.

Menyangkut permasalahan gizi buruk, Edyanus menyebut tidak terjadi seketika. Ada proses waktu yang cukup panjang, minimal 6 bulan, baru seseorang sampai kepada status gizi buruk. Pada tahap status kurang gizi, pemerintah seharusnya sudah dapat mengantisipasi dengan berbagai program, sehingga masyarakat tidak terjerebab pada status gizi buruk.

Edyanus menyatakan ada sejumlah program yang dapat dilakukan untuk dapat mengatasi terjadinya gizi buruk tersebut, yaitu dengan menjaga stabilitas dan ketersediaan bahan pangan sesuai dengan standar mutu kebutuhan gizi yang layak, melakukan pendidikan sadar gizi secara berkesinambungan dan tepat sasaran agar masyarakat dapat terhindar dari cara-cara yang akan mengakibatkan terjadinya gizi buruk. Kemudian membina dan memperhatikan kader-kader kesehatan desa baik melalui Puskesmas maupun Posyandu.

Menurut Edyanus, permasalahan kemiskinan dan gizi buruk di Riau juga terlepas dari pola pembangunan yang diterapkan. Dia mencermati orientasi pembangunan lebih sekedar pelaksanaan proyek-proyek fisik semata, yang tidak bersentuhan kepada perbaikan masyarakat, tapi lebih banyak berpindah kepada kepentingan pejabat. "Ini yang harus diubah. Pemerintah saat ini harus lebih mengedepankan SDM, mulai dari bayi sampai kepada dewasa agar kita memiliki SDM yang



kompeten dan dapat diandalkan. Setelah SDM masyarakat kita ini bagus baru program infrastruktur fisik kita bangun, yang disesuaikan dengan kebutuhan,” paparnya.

Dengan anggaran yang cukup besar dimiliki Riau, yang terlihat dari angka APBD yang bila ditotal mencapai Rp 19 trilyun, Edyanus menyebut seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kenyataannya, dana yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu menjadi tidak berarti. “Karena cenderung hanya dinikmati segelintir orang. Dan, aspek pencapaian kesejahteraan rakyat terdistorsi oleh kekuasaan dan perilaku ekonomi yang tidak etis atau dengan kata lain tidak beradab,” tukasnya.

Perekonomian di Riau, lanjut dia, diakui cukup tinggi dimana pada tahun 2006 tercatat 8,16%. Hanya, sebagian besar didorong oleh eksploitasi sumber-sumber alam yang kurang terkait dengan pencerahan masyarakat banyak. Akibatnya, daya ungkit pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin sangat kecil. Edyanus mencontohkan, di Riau rata-rata setiap tahun hanya mampu mengurangi penduduk miskin selama lima tahun pasca otonomi daerah sebesar 2,29 % saja. Dari tahun 2004-2005 penduduk miskin hanya menyusut sebesar 1,23%. “Ini artinya kemampuan ekonomi yang tinggi mengurangi jumlah masyarakat miskin tidak signifikan,” terangnya.



1. Diteliti mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Pada hal, kata Edyanus, APBD dari provinsi sampai ke kab/kota setiap tahunnya juga terus bertambah besar. “Kenyataan ini seperti mengidentifikasi kepada kita bahwa pembangunan di Provinsi Riau ini sudah salah kaprah,” tandasnya.

Edyanus mengungkapkan penduduk miskin yang pengurangannya sangat sedikit sekali, pengangguran yang tidak terselesaikan dengan baik, merebaknya penyakit menular sampai bertambahnya masyarakat yang berstatus gizi buruk adalah indikator yang mencerminkan gagalnya suatu daerah atau wilayah. Karena pemerintah diberikan suatu amanat oleh rakyat untuk mengelola aset-aset negara ini untuk semata peningkatan kesejahteraan rakyat.

Solusi dari permasalahan di atas, ujar dia, harus dimulai dari pendistribusian aset-aset ekonomi, terutama sekali milik pemerintah, untuk diarahkan kepada sektor-sektor produktif masyarakat banyak. Kemudian kembangkan dunia pendidikan sehingga masyarakat Riau mampu bersaing di era global. “Hentikanlah pembuatan proyek-proyek besar yang cenderung mubazir, karena tidak bersentuhan langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Di dalam meningkatkan kualitas pendidikan memang tidak langsung terlihat jelas dalam jangka waktu yang pendek. “Kita bisa mencontoh negara luar seperti Jepang, Malaysia, Singapura, Vietnam



apalagi Cina. Mereka berhasil seperti sekarang ini berkat kepedulian mereka terhadap dunia pendidikan,” tutur Edyanus Herman Halim. (Zulfikri)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber;
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

60 Persen Pertumbuhan Penduduk Riau dari Kaum Urban



PEKANBARU (RP) - Angka pertumbuhan penduduk Riau termasuk yang tertinggi di Indonesia, yakni 3,4 persen. Ini lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan penduduk nasional yang hanya 1,3 persen.

Ironisnya, 60 persen angka pertumbuhan itu berasal dari kaum urban yang bermigrasi ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Riau, seperti Pekanbaru, Siak, Dumai, Pelalawan, Rohul, Rohil, Bengkalis dan beberapa daerah lain.

Migrasi itu tidak saja dari kalangan profesional dengan tingkat akademik dan *skill* baik, namun sejak otonomi bergulir dan Riau menjadi “pusat gula”, migrasi itu telah didominasi oleh kalangan urban dengan *skill* dan kemampuan akademik rendah. Hal



ini jelas, berkorelasi erat dengan semakin tingginya tingkat kemiskinan di Bumi Lancang Kuning ini.

Menurut pengamat ekonomi dari Universitas Riau Edyanus Herman Halim SE MS, sistem desentralisasi di era otonomi memang telah memberikan Riau kemampuan sumber daya ekonomi yang sangat tinggi, "Akibatnya, banyaklah orang datang ke Riau. Bukan hanya pencari kerja profesional tapi juga kaum urban yang kemampuan SDM dan ekonominya rendah. Malah, 2004 angka pertumbuhan penduduk itu 70 persen dari migrasi," ujar Edyanus kepada *Riau Pos*, Senin (14/ 11) di Pekanbaru.

Di jelaskan dosen Fakultas Ekonomi Unri itu, migrasi memiliki dua sisi, positif dan negatif. *Pertama*, migrasi kalangan profesional memberikan hasil positif bagi pertumbuhan dan pembangunan. Sebaliknya, bagi penduduk Riau yang *skill*-nya rendah, kehadiran migrasi profesional ini membuat daya kompetisi ekonomis mereka menjadi semakin rendah. "SDM Riau itu sejak dulu memang di-kesampingkan. Kini, dengan otonomi, wajar jika pemimpin daerah ini memikirkan SDM-nya, agar lebih tinggi taraf ekonomi dan pendidikannya," kata Edyanus lagi.

Di sisi lain, migrasi kaum urban dengan *skill* dan akademik rendah, merupakan penyumbang terbesar dari semakin tingginya angka kemiskinan bagi provinsi ini.



“Kenyataan inilah yang mungkin, ingin dilecut Gubri Rusli Zainal, melalui program pemberantasan kebodohan dan kemiskinan itu,” ujarnya lagi.

Seperti Kota Pekanbaru, menurut Edyanus kaum urban yang melakukan migrasi dan menjadi penyumbang bertambahnya angka kemiskinan — yang kerap disebut pendatang itu, bukan saja kaum urban dari luar Riau, tapi juga berasal dari Riau sendiri. “Itu harus diakui. Data menunjukkan itu. Dan kalau sebegitu derasnya angka migrasi kaum urban itu ke Riau, sudah sepatutnyalah kita semua sigap untuk siaga akan kemungkinan negatif yang bisa ditimbulkannya. Apalagi jika persentase migrasi itu, didominasi oleh migrasi dari luar Riau,” katanya.

Edyanus memang tidak “asal cakap”. Data yang diperoleh *Riau Pos* dari Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru, pada 2005 saja tercatat 34.264 kaum urban ke Pekanbaru. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding 2004 yang hanya 6.146. Malah, menurut Kepala Distarduk HR Dorman Djohan, diperkirakan 2006 arus pendatang ke Kota Pekanbaru akan semakin membengkak.

Hal yang sama, menurutnya, juga terjadi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lain seperti Duri, Perawang, Kerinci, Ujungbatu, Dumai dan tempat-tempat lainnya. “Tapi, jangan diarah-arahkan ke hal yang negatif begitulah, apalagi sampai ada pertentangan etnik begitu, bahkan ada yang menyebut sebagai rasis. Terlalu, justru yang mengarah-



arahkan yang terlalu tendesius, dan bisa memicu ketidakseimbangan sosial,” ujar Edyanus.

Pernyataan Gubri, kata Edyanus, merupakan sebuah refleksi kepedulian yang tinggi terhadap rendahnya kondisi SDM Riau — yang berkorelasi erat dengan tingkat kemiskinan itu. “Karenanya, marilah kita cermati ini dan berpikiran positif, guna meningkatkan harkat dan martabat SDM masyarakat Riau. Jangan dikembang-kembangkan ke isu etnik, dan dipolitisir-politisir begitu. Apalagi sampai menyimpulkan soal rasis itu. Tak ada itu. Tak mungkin. Saya ngomong karena ini hal prinsip bagi Riau, jadi kawan-kawan jangan begitulah. Dan, yang perlu diingat juga, ada pepatah, “*Jalan dianjak, orang lain*”. Masyarakat Riau itu memang harus ditingkatkan daya kompetisinya, keterampilannya sehingga ia bisa duduk sama rendah dan tegak sama tinggi. Selama ini, Riau terpinggirkan, wajar jika sekarang pemimpinnya perhatian sama rakyatnya,” ujarnya lagi. (mal/ria/muh)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

© Hak cipta milik Universitas Riau